



Analisis Kepatuhan Pajak melalui Extended Slippery Slope Framework: Kajian Literatur

Wafa Khairani, Nabil Dzaky Murtadha

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
wafakhairanikurniawan@gmail.com

Abstrak

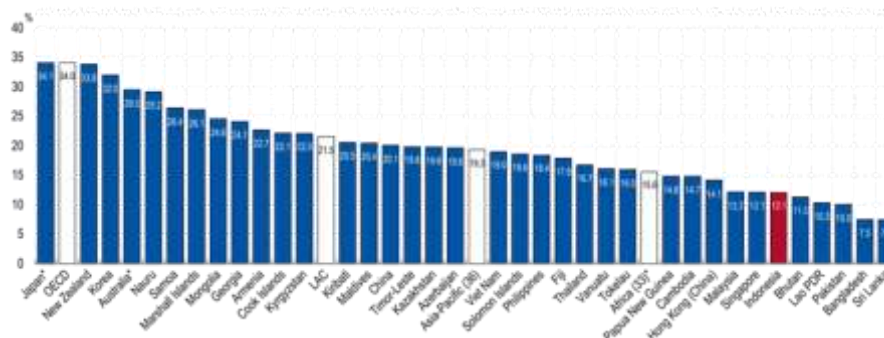
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh extended slippery slope framework terhadap kepatuhan pajak melalui kajian literatur yang mendalam. Extended slippery slope framework mengintegrasikan kekuasaan koersif, kekuasaan legitimasi, serta dua jenis kepercayaan kepercayaan implisit dan berbasis alasan dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Berdasarkan kajian terhadap 10 penelitian terdahulu, temuan menunjukkan bahwa kekuasaan koersif berpengaruh signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak dalam jangka pendek, namun dapat menurunkan hubungan jangka panjang antara otoritas pajak dan wajib pajak. Di sisi lain, kekuasaan legitimasi yang berfokus pada keadilan dan kewajaran kebijakan lebih efektif untuk membangun kepatuhan dalam jangka panjang. Kepercayaan implisit terbukti lebih kuat dalam mendorong kepatuhan dibandingkan kepercayaan berbasis alasan, karena terbentuk melalui hubungan yang tidak didasari pertimbangan rasional. Namun, kepercayaan berbasis alasan tetap memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan yang efektif harus menggabungkan kedua jenis kekuasaan dengan pendekatan berbasis kepercayaan untuk mencapai kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan efektif.

Kata kunci: Extended Slippery Slope Framework, Kekuasaan Koersif, Kekuasaan Legitimasi, Kepercayaan Implisit, Kepercayaan Berbasis Alasan, Kepatuhan Pajak

1. Latar Belakang

Pajak memainkan peran kunci dalam struktur keuangan negara sebagai salah satu sumber utama pendapatan untuk berbagai kepentingan dan program yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penerimaan pajak berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 65,37%, tahun 2023 sebesar 88,7% dan tahun 2024 sebesar 97,2% (www.kemenkeu.go.id).

Pajak memainkan peran kunci dalam struktur keuangan negara sebagai salah satu sumber utama pendapatan untuk berbagai kepentingan dan program yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penerimaan pajak berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 65,37%, tahun 2023 sebesar 88,7% dan tahun 2024 sebesar 97,2% (www.kemenkeu.go.id).



Gambar 1. Revenue statistics in Asia and the Pacific 2024

Revenue statistics in Asia and the Pacific 2024 yang diterbitkan oleh *Organisation Co-operation and Development* (OECD)'s pada tahun 2024 menyajikan informasi mengenai perbandingan pendapatan pajak di 36 negara di wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 31 yaitu dengan *tax to GDP ratio* sebesar 12,1% pada tahun 2022, lebih rendah 7,3% dibandingkan dengan rata-rata wilayah Asia dan Pasifik (36 Negara) yaitu sebesar 19,3%.

Wakil ketua Dewan Ekonomi Indonesia (DEN) Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa pada tahun 2024 *tax gap* Indonesia mencapai 6,4 %. Persentase tersebut cukup besar karena *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) memberikan ketentuan *benchmark* atau angka normal *tax gap* sebesar 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Tax gap* merupakan selisih antara jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah dan jumlah pajak yang sebenarnya diterima oleh pemerintah. *Tax gap* dapat menjadi salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perilaku wajib pajak dalam hal ketidakpatuhan pajak (*tax non-compliance*).

Isu mengenai kepatuhan pajak sudah banyak diteliti dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, hukum, ekonomi, psikologi dan akuntansi (Haq & Misra, 2023). Topik penelitian mengenai psikologi pajak masih belum banyak diteliti hingga saat ini (Kekec, 2022). Namun, terdapat salah satu teori yang mengintegrasikan faktor sosial dan psikologis untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak yaitu *slippery slope framework* yang dikembangkan oleh (Kirchler et al., 2008). *Slippery slope framework* menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kekuasaan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Slippery slope framework hanya mengkategorikan kekuasaan dan kepercayaan menjadi tinggi dan rendah, hal ini mendorong untuk mengembangkan kerangka yang lebih luas sehingga muncul *extended slippery slope framework*, kerangka ini digunakan untuk menggambarkan kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan dinamis (Gangl et al., 2019). *Extended slippery slope framework* mengkategorikan kekuasaan (*power*) menjadi kekuasaan koersif (*coercive power*) dan kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) adapun perilaku wajib pajak dalam kategori ini yaitu kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Kategori kepercayaan (*trust*) dibedakan menjadi kepercayaan berbasis alasan (*reason-based trust*) dan kepercayaan implisit (*implicit trust*) sikap atau perilaku wajib pajak terkait berdasarkan *trust* yaitu kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh *coercive power*. Undang-undang perpajakan Indonesia, UU Nomor 28 tahun 2007 menetapkan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk meningkatkan kemakmuran negara. *Coercive power* merupakan kekuatan otoritas pajak yang dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak (Kirchler, 2021). Kekuasaan koersif digunakan ketika otoritas pajak merasa perlu untuk menegakan aturan melalui sanksi untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang berlaku. *Legitimate power* dianggap mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, karena masyarakat percaya bahwa dirjen pajak merupakan otoritas yang sah secara hukum untuk mengumpulkan dan mengelola pajak dari wajib pajak.

Implicit trust merupakan respons otomatis dan tidak disadari yang muncul tanpa disengaja terhadap berbagai rangsangan, seperti wajah yang tampak ramah, suara yang menenangkan, atau dokumen yang terlihat memiliki kesan resmi (Gangl et al., 2016). *Reason based trust* merupakan kepercayaan yang berangkat dari pemikiran yang rasional terkait dengan kinerja otoritas pajak dalam memberikan manfaat penerimaan pajak bagi pembangunan dan pelayanan publik. *Legitimate power* memberikan iklim sinergi *power and trust* antara otoritas pajak dengan wajib pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak untuk jangka waktu yang relatif panjang (Haq & Misra, 2023).

Di Indonesia tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak cenderung melemah, hal ini disebabkan karena adanya persepsi negatif terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang

terjadi pada tahun 2025 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Mohammad Haniv sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai Rp. 21, 5 miliar (Nasution, 2025). Kasus dugaan korupsi di lingkungan Dirjen Pajak juga pernah terjadi pada tahun 2023, pemberitaan tersebut membentuk persepsi bahwa penerimaan pajak rentan disalahgunakan. Hal ini tentunya merusak kepercayaan wajib pajak karena terusiknya kontrak sosial antara negara dan wajib pajak.

Trust dibentuk dalam proses yang lama, namun *distrust* dapat berpengaruh dengan sangat cepat dan dramatis. Kepercayaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan secara sukarela untuk patuh pada aturan. Kepercayaan implisit terbentuk secara tidak sadar atau melalui pengalaman umum dan norma sosial, tanpa adanya analisis atau evaluasi yang mendalam. Kepercayaan ini lebih terhubung dengan perasaan cinta tanah air dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik (*patriotism*).

Coercive power tidak berpengaruh terhadap *tax compliance* (Anisykurlillah et al., 2024). Dapat dikatakan bahwa paksaan atau pengenaan denda tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. *Legitimate power* tidak berpengaruh terhadap *tax compliance* (Faizal et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa *legitimate power* saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak jika tidak disertai dengan faktor lain seperti *trust* dan *patriotism*. Berdasarkan teori identitas sosial rasa *patriotism* dapat meningkatkan loyalitas wajib pajak. Individu dengan *patriotism* yang tinggi cenderung lebih sukarela mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Murtadha & Nazaruddin, 2018). Begitupun ketika *implisit trust* terhadap otoritas pajak dan *patriotism* rendah, tingkat kepatuhan pajak juga rendah, karena wajib pajak merasa tidak memiliki hubungan moral yang kuat untuk membayar pajak dan tidak sepenuhnya yakin terhadap pengelolaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *coercive power*, *legitimate power*, *reason-based trust* dan *implisit trust* terhadap *tax compliance* dengan *patriotism* sebagai variabel moderator.

Meskipun *extended slippery slope framework* telah diadopsi secara luas sebagai kerangka teoritis dalam studi kepatuhan pajak, masih terdapat inkonsistensi temuan empiris mengenai relasi antar variabel yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan suatu tinjauan literatur yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi secara komprehensif korelasi antara berbagai faktor dalam model kepatuhan pajak yang berlandaskan pada *extended slippery slope framework*.

Penelitian terkait kajian literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisa dan mengintegrasikan hasil-hasil temuan sebelumnya terkait model kepatuhan wajib pajak berbasis *extended slippery slope framework* dengan *patriotism* sebagai variabel moderating. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas *extended slippery slope framework* dalam konteks kepatuhan wajib pajak, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan model dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang relevan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui proses pengumpulan, seleksi, dan analisis kritis terhadap berbagai studi ilmiah yang telah dipublikasikan, dengan tujuan menjawab permasalahan atau topik penelitian tertentu. Berbeda dengan metode penelitian lapangan yang menuntut peneliti memperoleh data secara langsung dari responden, SLR dilaksanakan dengan menelaah dan menginterpretasikan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang tersedia dalam publikasi ilmiah, seperti jurnal, artikel akademik, maupun laporan penelitian.

Tahapan dalam proses SLR dimulai dari *planning*, yaitu merumuskan tujuan yang jelas, pertanyaan penelitian dan ruang lingkup topik. Tahap selanjutnya yaitu *conducting*, proses pencarian, seleksi dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik bahasan dan tahap terakhir yaitu *reporting*, proses penyusunan dan penyajian hasil sintesis penelitian sebagai Kesimpulan akhir.

Planning

Pada tahap ini, peneliti merumuskan tujuan penelitian secara jelas, menetapkan pertanyaan penelitian (*research questions*), serta menentukan ruang lingkup kajian untuk memastikan fokus penelitian tetap terarah. Selain itu,

peneliti menyusun protokol SLR yang mencakup kriteria inklusi dan eksklusi literatur, strategi pencarian, serta metode analisis yang akan digunakan. Berikut proses penyusunan pertanyaan berdasarkan topik utama dan literatur penelitian

Tabel 1. Research Question

RQ1	Bagaimana pengaruh <i>coercive power</i> terhadap <i>tax compliance</i> ?
RQ2	Bagaimana pengaruh <i>legitimate power</i> terhadap <i>tax compliance</i> ?
RQ3	Bagaimana pengaruh <i>reason-based trust</i> terhadap <i>tax compliance</i> ?
RQ4	Bagaimana pengaruh <i>implicit trust</i> terhadap <i>tax compliance</i> ?
RQ5	Apakah <i>service climate</i> memediasi hubungan antara <i>power</i> dan <i>trust</i> terhadap <i>tax compliance</i> ?
RQ6	Apakah <i>antagonistic climate</i> memediasi hubungan <i>coercive power</i> terhadap <i>tax compliance</i> ?
RQ7	Apakah <i>confidence climate</i> memediasi hubungan <i>implicit trust</i> terhadap <i>tax compliance</i> ?

Conducting

Proses *conducting* mencakup identifikasi, penyaringan, dan seleksi artikel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Selanjutnya, literatur yang terpilih dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, dan temuan-temuan kunci. Ditahap ini pertama melakukan pencarian sumber secara sistematis yaitu jurnal yang membahas tentang “Extended Slippery Slope Framework Terhadap Kepatuhan Pajak” melalui basis data ilmiah di situs <https://scholar.google.com/> yang diterbitkan 7 tahun terakhir yaitu 2019-2025. Selanjutnya dilakukan evaluasi berdasarkan pernyataan kriteria penilaian kualitas yaitu quality assessment sebagai berikut:

Tabel 2. Quality Assesment

QA	Kriteria Penilaian Kualitas	Sesuai Kriteria	
		Ya	Tidak
QA1	Apakah paper jurnal diterbitkan rentang waktu 2019-2025?		
QA2	Apakah paper jurnal berhubungan dengan <i>coercive power</i> , <i>legitimacy power</i> , <i>reason based trust</i> , <i>implicit trust</i> , <i>service climate</i> , <i>antagonistic climate</i> , <i>confidence climate</i> dan <i>tax compliance</i>		
QA3	Apakah jurnal bisa diakses melalui situs https://scholar.google.com/		

Dalam rangka memastikan bahwa hanya artikel yang memenuhi kelayakan digunakan sebagai sumber *literature review*, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara jelas. Penetapan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi proses identifikasi dan seleksi literatur yang memiliki relevansi langsung dengan topik utama penelitian, sehingga kualitas dan kesesuaian sumber dapat terjaga Reporting.

Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

<i>Inklusi</i>	<i>Eksklusi</i>
1. Penelitian fokus pada pengaruh <i>coercive power</i> , <i>legitimacy power</i> , <i>reason based trust</i> , <i>implicit trust</i> , <i>service climate</i> , <i>antagonistic climate</i> , <i>confidence climate</i> dan <i>tax compliance</i> 2. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	1. Jurnal yang tidak membahas terkait dengan variabel penelitian 2. Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Tahap akhir pada proses *conducting* meliputi penyusunan ringkasan jurnal terdahulu yang sesuai dengan *quality assessment* serta seleksi berdasarkan kriteria *inklusi* dan *eksklusi*. Jurnal penelitian yang dinilai relevan kemudian digunakan sebagai dasar kajian sesuai dengan topik utama. Berikut disajikan ringkasan jurnal yang menjadi sumber dalam *literature review* ini.

Tabel 4. Riset Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan Utama
1	Arif Nadzirul Haq & Fauzan Misra (2023)	Pengujian Extended Slippery Slope Framework dalam Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen	Desain eksperimen 2x2 antar subjek yang melibatkan 79 partisipan. Pengujian hipotesis menggunakan uji anova	Kepercayaan implisit lebih berpengaruh daripada kepercayaan berbasis alasan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kekuasaan legitimasi lebih berpengaruh dibandingkan kekuasaan koersif.	Tidak ada pengaruh antara kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.
2	Linawati & Syahril Djaddang (2024)	Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations	Systematic Literature Review (SLR).	Kepercayaan pada otoritas pajak mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan kekuasaan memastikan adanya konsekuensi untuk ketidakpatuhan. Kekuasaan koersif efektif dalam jangka pendek, tetapi kekuasaan legitimasi dan pendekatan edukatif lebih efektif dalam jangka panjang.	Model Slippery Slope tetap relevan dan digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak.
3	Dewi Ayu Marcelina & Nurhayati (2024)	Menguji Hubungan Trust Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slippery Slope Framework di Negara OECD	Deskriptif Kuantitatif, Korelasi Pearson dan Analisis Regresi Panel	Kepercayaan dan kekuasaan berkorelasi positif terhadap kepatuhan pajak, namun tidak ada efek kausal antara kepercayaan dan kekuasaan pada kepatuhan pajak.	Kepercayaan dan kekuasaan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak, tetapi tidak saling memengaruhi secara kausal
4	Marcella & Wahyu Prasetya (2023)	Pengaruh Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Oleh Trust In Authority	Data Kuantitatif	kekuatan legitimasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak; kekuatan legitimasi juga berpengaruh signifikan terhadap ketaatan pajak individu; kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan pajak individu;	Kekuatan legitimasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepercayaan dan ketaatan pajak, namun kepercayaan tidak memengaruhi ketaatan maupun menjadi mediator

				dan kepercayaan pada otoritas pajak tidak berperan sebagai mediator antara kekuatan legitimasi dan ketaatan pajak individu.	hubungan tersebut.
5	Benny Ramadhan & Ahmad Rodoni (2021)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework	Penelitian non Ekperimental dengan Analisis Kuantitatif	Seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap seluruh variabel intervening dan variabel intervening berpengaruh positif terhadap variabel terikat.	Pendekatan Extended Slippery Slope Framework atas Kepatuhan Wajib Pajak
6	Katharina Gangl, Eva Hofman, Barbara Hartl & Mihaly Berkics (2019)	The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: evidence for the extended slippery slope framework from Austria, Finland, and Hungary	Data Kuantitatif lintas Negara (Cross-National Survey)	Kekuasaan koersif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui mediasi kepercayaan implisit, sedangkan kekuasaan legitimasi berpengaruh terhadap kepatuhan sebagian melalui kepercayaan berbasis alasan. Kepercayaan implisit memengaruhi kepatuhan pajak melalui iklim kepercayaan dan kerja sama sukarela.	Baik kekuasaan maupun kepercayaan otoritas pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak, dengan pengaruh yang dimediasi oleh bentuk kepercayaan dan iklim interaksi positif.
7	I Nyoman Darmayasa, Nyoman Sentosa Hardika, I Made Marsa Arsana & I Made Agus Putrayasa (2024)	Accountants' Perspective on Tax Amnesty Enhances Tax Compliance Dimensions in Extended Slippery Slope Framework	Metode Kualitatif	Kegagalan <i>tax amnesty</i> dan <i>voluntary disclosure program</i> dalam membangun kepatuhan jangka panjang terjadi karena dimensi Value, Governance, dan Prosperity pada Extended Slippery Slope Framework belum sepenuhnya terimplementasi. Agar tujuan kepatuhan berkelanjutan tercapai, kebijakan turunan pasca-TA/VDP harus mengintegrasikan ketiga dimensi ini,	Kerangka Extended Slippery Slope untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak dengan menambahkan dimensi atau variabel baru dibandingkan kerangka aslinya yaitu Value, Governance dan Prosperity

8	Siti Fatimah Abdul Rashid, Rosiati Ramli, Mohd Rizal Palil & Amizawati Mohd Amir (2021)	The Influence of Power and Trust on Tax Compliance Motivation in Malaysia	Metode Kuantitatif	<i>Coercive power</i> dan <i>legitimate foundation power</i> meningkatkan kepatuhan terpaksa, sedangkan kerja sama sukarela dipengaruhi oleh <i>reward power</i> , <i>persuasive power</i> , dan <i>reason-based trust</i> . Kerja sama berkomitmen meningkat melalui <i>legitimate foundation power</i> , <i>reward power</i> , dan <i>implicit trust</i> , namun menurun akibat <i>coercive power</i>	Kekuasaan (<i>power</i>) dan kepercayaan (<i>trust</i>) terhadap otoritas pajak berpengaruh berbeda terhadap motivasi kepatuhan pajak. Temuan ini menekankan urgensi strategi regulasi yang terarah dan kontekstual untuk mencapai kepatuhan optimal dengan biaya efisien.
9	Elisa Tjondro, Joscelind Setiabudi, Alexandro Christian Joyo (2019)	Intergenerational Perceptions of Coercive and Legitimate Power	Metode Kuantitatif	Hasil tes menemukan Milenial dan X menilai bahwa otoritas pajak menerapkan kekuatan koersif dan kekuatan legitimasi dalam kondisi seimbang. Namun, persepsi berbeda ditemukan pada Baby Boomers yang berpikir otoritas pajak telah menerapkan kekuatan koersif dengan hukuman yang lebih berat kepada wajib pajak. Studi ini juga menemukan adanya perbedaan persepsi terkait ekuitas vertikal, ekuitas horisontal, dan pertukaran ekuitas antar generasi.	Hasil penelitian menunjukkan Milenial dan Generasi X menilai otoritas pajak menyeimbangkan <i>coercive</i> dan <i>legitimate power</i> , sedangkan Baby Boomer melihat dominasi <i>coercive power</i> . Terdapat pula perbedaan persepsi antargenerasi terkait <i>vertical equity</i> , <i>horizontal equity</i> , dan <i>exchange equity</i> .
10	Yenni Mangoting, Christoper, Natasya Kriwangko & Winda Adriyani (2020)	Interaksi Komitmen Dalam Dinamika Kepatuhan Pajak	Metode Penelitian Structural Equation Model	Komitmen menjadi faktor utama yang dapat mempertahankan keharmonisan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak di masa depan. Sebaliknya, kekuatan	Komitmen menjadi kunci menjaga hubungan harmonis wajib pajak–otoritas pajak, sementara <i>coercive</i> dan

				koersif dan kekuatan legitimasi cenderung tidak mampu mendorong ketaatan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu merancang pendekatan kepatuhan pajak berdasarkan prinsip komitmen.	<i>legitimate power</i> kurang efektif mendorong kepatuhan. Otoritas pajak perlu mengutamakan pendekatan berbasis komitmen.
--	--	--	--	--	---

3. Hasil dan Diskusi

Kepatuhan pajak merupakan salah satu elemen krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, otoritas pajak perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan satu pendekatan, melainkan sebuah strategi yang mempertimbangkan berbagai faktor psikologis, sosial, dan hukum yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Salah satu kerangka teoretis yang relevan dalam memahami dinamika kepatuhan pajak adalah extended slippery slope framework.

Extended slippery slope framework mengintegrasikan berbagai dimensi kekuasaan dan kepercayaan dalam menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan koersif (*coercive power*) dan kekuasaan legitimasi (*legitimacy power*), serta peran kepercayaan (*implicit trust* dan *reason-based trust*) dalam menciptakan motivasi untuk patuh. *Coercive power* lebih menekankan pada pemberian sanksi atau ancaman, sementara *legitimacy power* berfokus pada penerimaan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang didasari oleh kewajaran dan keadilan kebijakan. Selain itu, kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap otoritas pajak, baik yang bersifat implisit maupun berbasis alasan, berperan penting dalam mendorong kepatuhan yang lebih sukarela dan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada konsep ini, pembahasan selanjutnya akan menggali lebih dalam mengenai peran masing-masing variabel dalam extended slippery slope framework, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap terciptanya kepatuhan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kekuasaan Koersif (Coercive Power)

Kekuasaan koersif berfokus pada penerapan sanksi atau ancaman untuk memaksa kepatuhan. Berdasarkan penelitian Linawati & Djaddang (2024), kekuasaan koersif terbukti efektif dalam mempengaruhi kepatuhan pajak dalam jangka pendek. Namun, meskipun mampu memberikan dampak langsung pada kepatuhan, penggunaan kekuasaan koersif yang berlebihan berpotensi merusak hubungan jangka panjang antara otoritas pajak dan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan dari Rashid et al., (2021) yang menunjukkan bahwa kekuasaan koersif dapat meningkatkan kepatuhan terpaksa, namun lebih mengarah pada kepatuhan yang bersifat sementara, bukan komitmen sukarela.

Legitimacy Power (Kekuasaan Legitimasi)

Kekuasaan legitimasi berhubungan dengan penerimaan otoritas pajak berdasarkan kepercayaan terhadap kewajaran dan keadilan kebijakan yang diterapkan. Penelitian oleh Marcella & Prasetya (2023) menunjukkan bahwa kekuasaan legitimasi memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu. Selain itu, kekuasaan legitimasi berperan dalam memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Linawati & Djaddang, (2024) juga mengemukakan bahwa meskipun kekuasaan koersif memiliki pengaruh jangka pendek, kekuasaan legitimasi yang diterapkan dengan pendekatan edukatif dan informatif lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Kepercayaan Implisit (Implicit Trust)

Kepercayaan implisit, yang muncul dari keyakinan tanpa pertimbangan rasional mendalam, memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan pajak. Seperti yang disampaikan oleh Haq & Misra (2023), kepercayaan implisit lebih berpengaruh daripada kepercayaan berbasis alasan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dapat

dijelaskan oleh kecenderungan wajib pajak untuk lebih mempercayai otoritas pajak secara otomatis, berdasarkan hubungan yang telah dibangun sebelumnya. Selain itu, dalam konteks extended slippery slope framework, kepercayaan implisit dapat memperkuat kerja sama sukarela, seperti yang dijelaskan oleh Gangl et al., (2019) yang menunjukkan bahwa kepercayaan implisit berperan dalam menciptakan iklim kerja sama yang mendukung kepatuhan pajak.

Kepercayaan Berbasis Alasan (Reason-Based Trust)

Kepercayaan berbasis alasan mengarah pada evaluasi sadar dan rasional terhadap kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Haq & Misra, (2023) mengungkapkan bahwa meskipun kepercayaan berbasis alasan memiliki peran, kepercayaan implisit lebih dominan dalam mendorong kepatuhan pajak. Namun, kepercayaan berbasis alasan tetap penting, terutama dalam konteks kekuasaan legitimasi, di mana wajib pajak cenderung memberikan kepercayaan lebih besar kepada kebijakan yang dianggap adil dan rasional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gangl et al., (2019), yang menunjukkan bahwa kepercayaan berbasis alasan berperan dalam meningkatkan kepatuhan melalui kekuasaan legitimasi.

Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi kekuasaan koersif, kekuasaan legitimasi, dan berbagai bentuk kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap otoritas pajak. Marcelina & Nurhayati, (2023) menunjukkan adanya korelasi positif antara kepercayaan dan kekuasaan terhadap kepatuhan pajak, meskipun tidak ada hubungan kausal langsung antara kepercayaan dan kepatuhan pajak. Dalam konteks extended slippery slope framework yang mengintegrasikan dimensi kekuasaan koersif, kekuasaan legitimasi, kepercayaan implisit, dan kepercayaan berbasis alasan, temuan dari Darmayasa et al., (2024) menunjukkan pentingnya penerapan ketiga dimensi ini (value, governance, dan prosperity) dalam kebijakan pajak jangka panjang. Kegagalan program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang disebabkan oleh belum optimalnya implementasi dimensi-dimensi ini.

Mangoting et al., (2020) pendekatan berbasis komitmen dianggap lebih efektif dalam mempertahankan hubungan harmonis antara wajib pajak dan otoritas pajak. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada kombinasi antara kekuasaan koersif dan legitimasi, serta pemanfaatan kepercayaan implisit dan berbasis alasan, menjadi penting untuk mencapai kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian oleh Ramadhan & Rodoni, (2021) menegaskan bahwa kekuasaan, baik koersif maupun legitimasi, memengaruhi kepatuhan pajak melalui variabel intervening seperti komitmen dan kerja sama sukarela. Rashid et al., (2021) menekankan bahwa kerja sama sukarela, yang dipengaruhi oleh kepercayaan implisit dan berbasis alasan, dapat memperkuat kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan kepatuhan yang dipaksakan melalui kekuasaan koersif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah terhadap sepuluh studi yang meneliti kepatuhan pajak (tax compliance) melalui extended slippery slope framework memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Kekuasaan koersif dan legitimasi, bersama dengan kepercayaan implisit dan berbasis alasan, memainkan peran yang saling terkait dalam membentuk perilaku wajib pajak. Meskipun kekuasaan koersif efektif dalam jangka pendek, kekuasaan legitimasi dan kepercayaan yang dibangun secara sukarela lebih berpengaruh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang efektif harus mengintegrasikan kedua jenis kekuasaan ini dengan pendekatan berbasis kepercayaan untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam merancang kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Referensi

1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* | Academic Press, Inc., 50(1), 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
2. Anisykurlillah, I., Sugiyat, J., & Mukhibad, H. (2024). The Power of Tax Authority and Tax Compliance: Does Tax Literacy Matter? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1), 99–113.
3. Blank, T., & Schmidt, P. (2003). National identity in a United Germany: Nationalism or patriotism? An empirical test with representative data. *Political Psychology*, 24(2 SPEC.), 289–312. <https://doi.org/10.1111/0162-895x.00329>
4. Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
5. Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 85, 79–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.17576/AJAG-2017-08-07>

6. Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., Berkics, M., Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2019). The Impact of Powerful Authorities and Trustful Taxpayers : Evidence for The Extended Slippery Slope Framework from Austria , Finland , and Hungary. *Policy Studies*, 0(0), 1–14. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375>
7. Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Kirchler, E. (2016). Power of Authorities and Trust in Authorities Determine the Interaction Climate and Tax Compliance. *Contemporary Issues in Tax Research*, 87–102.
8. Haq, A. N., & Misra, F. (2023). Pengujian Extended Slippery Slope Framework Dalam Kepatuhan Pajak : Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 1–22.
9. Kecec, M. (2022). *Tax Psychology And Tax Amnesties In Taxpayer Perception*. Iksad Publishing House.
10. Kirchler, E. (2021). Strengthening Tax Compliance by Balancing Authorities' Power and Trustworthiness. University of Exeter, May. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108759458.055>
11. Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
12. Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2.69>
13. Mangoting, Y., Christophor, Kriwangko, N., & Adriyani, W. (2020). Interaksi Komitmen Dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 265–277. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.16>
14. Marcelina, D. A., & Nurhayati, N. (2023). Menguji Hubungan Trust Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slippery Slope Framework Di Negara Oecd. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18364>
15. Marcella, & Prasetya, W. (2023). Pengaruh Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi oleh Trust in Authority. *Syntax Idea*, 5(10), 1825–1834. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2958>
16. Murtadha, N. D., & Nazaruddin, I. (2018). The Effect of Patriotism and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. 4th International Conference on Accounting and Finance.
17. Nasution, A. D. (2025). KPK Tetapkan Eks Kakanwil Pajak Jakarta Tersangka Gratifikasi Rp 21,5 M. *Katadata.Co.Id*.
18. Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(09). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.408>
19. Rashid, S. F. A., Ramli, R., Palil, M. R., & Amir, A. M. (2021). The Influence of Power and Trust on Tax Compliance Motivation in Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 15(1), 133–148.
20. Staub, E. (1978). *Positive Social Behavior and Morality: social and personal Influences*. Academic Press.